

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Jika berbicara tentang hukum, maka pikiran kita akan langsung menuju kepada undang-undang, perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sebenarnya, hukum mempunyai banyak aspek yang terdiri jauh lebih banyak komponen atau unsur yang lain, seperti misalnya filsafat hukum, sumber hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, perilaku hukum masyarakat maupun pejabat hukum, atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Hukum di Indonesia berlaku bagi semua golongan masyarakat, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Hukum dibagi menjadi beberapa cabang hukum, salah satunya adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Adanya pembedaan sanksi pidana bagi orang dewasa dan anak berdampak pada adanya hak anak yang istimewa atau memiliki kekhususan tersendiri. Di Indonesia peraturan mengenai anak yang berhadapan dengan

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 38.

<sup>2</sup> Yuliesna Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 60.

hukum diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat dengan SPPA. Anak sebagai pelaku tindak pidana (*offender*) memiliki kebijakan tersendiri dalam menanggulangi tindak pidana dan terhubung dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Anak merupakan penerus bangsa dipundaknya lah terletak berbagai macam tugas negara yang belum diselesaikan oleh generasi sebelumnya. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang sehat rohani dan jasmaninya, serta cerdas, berpendidikan dan bermoral tinggi. Anak supaya tumbuh dan berkembang menjadi warganegara yang baik maka perlu diberikannya kasih sayang, perlindungan, pengarahan, dan pembinaan yang tepat.<sup>3</sup>

Anak dalam hukum nasional maupun internasional mempunyai hak dan kewajiban. Dalam Deklarasi Majelis Umum PBB tertanggal 20 November 1989 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, memperoleh perlindungan hukum, baik terhadap segala bentuk

---

<sup>3</sup> M Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

penyiaian, kekejaman dan penindasan, maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang berbentuk diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan yang nyata, terdapat pula bahwa anak melakukan suatu tindak pidana. Anak sebagai subjek hukum pidana artinya anak sebagai pelaku suatu tindak pidana. Sanksi pidana yang didapatkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana mungkin saja dapat mempengaruhi jiwanya. Didalam SPPA adanya ketentuan-ketentuan khusus sanksi pidana yang diberikan tidak merusak masa depannya. Adanya asas dalam hukum pidana Indonesia bahwa sanksi pidana bagi seorang terpidana bukan merupakan suatu balas dendam melainkan merupakan suatu pendidikan untuk mencegah melakukan kejahatan lagi dimasa yang mendatang.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan berbagai lembaga dan perangkat hukum. Dalam SPPA telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, mulai saat penyidikan sampai proses perkara anak pada sidang pengadilan. Mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, misalnya dalam pemeriksaan tempat pemeriksaan anak dipisahkan dengan tempat pemeriksaan dewasa, adanya pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan dewasa.<sup>5</sup>

Dalam penyidikan oleh kepolisian atau jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur, dilakukan

---

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, *Op.Cit.*, p. 155

<sup>5</sup> Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 38.

dengan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.<sup>6</sup> Dalam proses persidangan perkara anak, tempat persidangan anak tentu dipisahkan dengan persidangan bagi orang dewasa, sedangkan jika dicampur atau tidak dipisahkan maka tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Tentang hal perkara anak, lembaga dan perangkat hukum wajib memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.<sup>7</sup>

Memperhatikan aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensial, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas Balai Pemasyarakatan) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan fisik dan psikologi terhadap anak agar menginterperstasikan kepribadiannya.<sup>8</sup>

Kedudukan Peradilan pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Dalam Pasal 27 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adanya pengadilan khusus yang

---

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 32.

<sup>7</sup> Pasal 18 UU SPPA

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 51.

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 tersebut bahwa yang disebut pengadilan khusus diantaranya adalah pengadilan anak.

Menurut Loebby Loqman tentang anak-anak seharusnya bukan sebagai peradilan biasa, akan tetapi sebagai suatu peradilan tersendiri tidak dimasukkan dalam peradilan umum, karena bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana seharusnya bukan diukur dari nilai orang dewasa, tetapi oleh kemampuan berfikir seorang anak.<sup>9</sup> Anak melakukan suatu tindak pidana dapat dipengaruhi oleh faktor *endogen* dan *eksogen*. Faktor *endogen* adalah faktor yang berasal dari diri si anak misalnya cacat yang bersifat fisiologis atau perkembangan kepribadian dan intelegensinya yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma yang berlaku. Sedangkan faktor *eksogen* adalah faktor yang berasal dari luar anak yang mempengaruhi tingkah laku atau perbuatannya, misalnya pengaruh negatif yang berasal dari orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau berkurangnya pengawasan oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, atau kurang pengisian waktu yang sehat oleh anak.<sup>10</sup>

Tindak asusila sering terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua atau orang terdekat. Dengan demikian pengawasan dan pendampingan orang tua sangat dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi anak terutama ketika beraktivitas di luar lingkungan rumah dan saat berhubungan dengan orang lain. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pengertian kepada anak tentang

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 139.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 143-144.



hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah tindakan pelecehan oleh orang lain.<sup>11</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tingkat pengadilan di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 terdapat 10 perkara pidana anak.<sup>12</sup> Dari 10 perkara tersebut 3 diantaranya adalah tentang perlindungan anak. Salah satu contoh adalah perkara nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds atas nama AW. AW dikenakan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hal pembuktian adalah hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana. Dari kasus di atas, AW mengaku jika tidak melakukan persetubuhan dengan korban (SM), namun korban mengaku jika telah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 7 kali. Dari hal tersebut, sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tersebut pula, hakim wajib mempertimbangkan laporan

---

<sup>11</sup> Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 2.

<sup>12</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kudus, “Daftar Perkara Pidana Anak”, <http://sipp.pn-kudus.go.id/> , diakses pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 05.38 WIB.

penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi bagaimana proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual dengan judul penelitian **“PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Kajian Atas Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses peradilan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual pada kasus yang diteliti ?
2. Bagaimana hambatan–hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual pada kasus yang diteliti
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana yang di teliti

#### **D. Kegunaan Peneitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian mengenai Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus) diharapkan memiliki kegunaan Penelitian secara teoritis sebagai berikut :

- a. Diharapkan mampu memberi penambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Seksual di Pengadilan Negeri.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur ilmu hukum mengenai peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Seksual di Pengadilan Negeri.

## **2. Kegunaan Praktis**

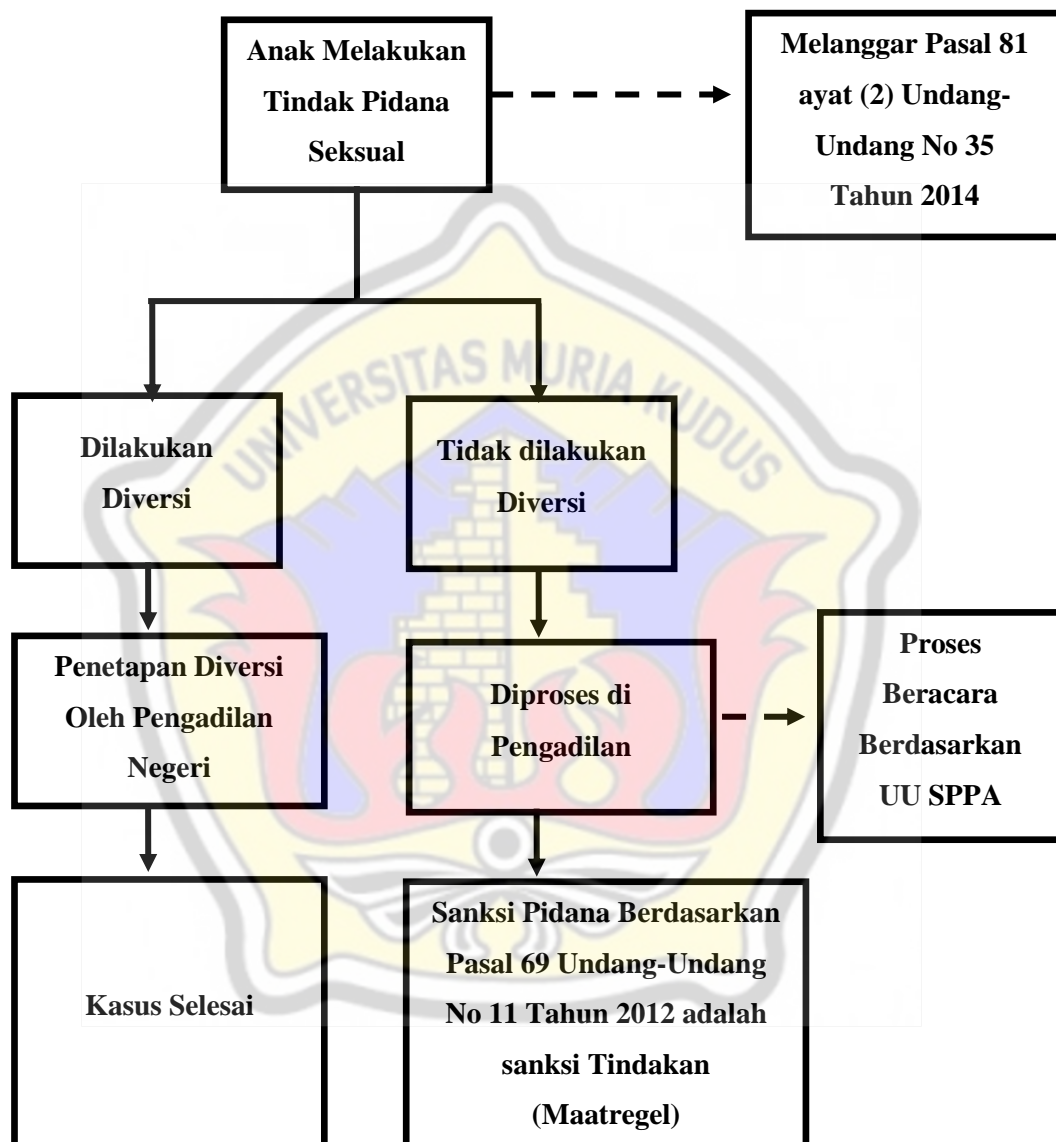
Penelitian mengenai Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus) diharapkan memiliki kegunaan Penelitian secara praktis sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang ada.
2. Diharapkan mampu memberikan masukan kepada para pihak yang berkompeten.



## E. Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini, maka digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan mempelajari secara singkat hubungan dari Bab I sampai dengan Bab III. Sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teoritis untuk penyusunan pada bab pembahasan. Isi dari tinjauan pustaka ini adalah anak melakukan tindak pidana, penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan Persidangan di Pengadilan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penggunaan metode penelitian yang digunakan serta uraian mengenai pengertiannya, alasan penggunaannya dan bagaimana operasionalisasinya. Isi dari metode penelitian ini adalah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil penelitian tersebut nanti akan dibahas dalam satu bagian yang tidak terpisahkan yang berisi tentang bagaimana proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual pada kasus yang diteliti dan hambatan – hambatan apa yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan dan saran tersebut maka diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

